Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page: 308 - 314

Peran dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Muhammad Hendra Saputro[1*], Baharuddin[2], Apriana Toding[3]

[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
Hendra7saputra@gmail.com[1*]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Fokus utama kajian adalah pada pelaksanaan tugas, hambatan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait administrasi pencairan anggaran, pencatatan transaksi, dan pertanggungjawaban keuangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman regulasi terbaru, serta keterlambatan dalam penyampaian dokumen pendukung. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan strategi peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, penguatan koordinasi internal, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya profesionalisme bendahara pengeluaran dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta perlunya dukungan kebijakan dan pengawasan yang konsisten.

Kata kunci: bendahara pengeluaran, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, BPPKAD, Papua Tengah

Abstract

This study aims to analyze the roles and responsibilities of the expenditure treasurer in the Secretariat of BPPKAD, Central Papua Province, focusing on task implementation, challenges encountered, and strategies to improve financial management practices. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document review. The findings reveal that the expenditure treasurer plays a crucial role in managing regional finances, particularly in budget disbursement, transaction recording, and financial accountability reporting. Nevertheless, several obstacles were identified, including limited human resource capacity, insufficient understanding of updated regulations, and delays in the submission of supporting documents. To address these issues, strategies such as technical training, strengthening internal coordination, and optimizing the use of regional financial information systems were implemented. This study highlights the strategic role of the expenditure treasurer in ensuring accountability and transparency in public financial management, and underscores the necessity of continuous policy support and oversight to enhance the quality of local governance.

Keywords: *expenditure treasurer, financial management, accountability, BPPKAD, Central Papua*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bendahara pengeluaran sebagai ujung tombak pelaksanaan pembendaharaan memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan aliran dana pemerintah daerah berjalan sesuai tata aturan serta akurat dalam pelaporan (Sutrisna, 2020). Di sisi lain, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan telah terbukti berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan daerah, seperti yang ditemukan oleh Pangaribuan dan Situmorang (2024) dalam studi di Kota Batam.

Khususnya di wilayah Papua dan sekitarnya, efektivitas kinerja bendahara dan implementasi akuntabilitas terbukti memengaruhi serapan anggaran secara signifikan, merefleksikan urgensi penguatan kapabilitas administrasi keuangan (Agustinus, 2024). Namun, terdapat gap dalam kajian mendalam mengenai peran bendahara pengeluaran di lingkungan Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah — yang memiliki tantangan geografis dan kapasitas sumber daya manusia unik.

Tabel 1. Temuan Studi Terkini terkait Peran Bendahara dan Akuntabilitas

Konteks Daerah	Fokus Penelitian	Temuan Utama
Kabupaten Bandung (BLUD)	Pengaruh peran bendahara terhadap kualitas laporan	Peran bendahara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan (jurnal.unnur.ac.id)
Kota Batam	Akuntabilitas & transparansi terhadap kinerja daerah	Keduanya berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah (Ejournal UST)
Kota Jayapura (Papua)	Kinerja bendahara dan akuntabilitas pada serapan anggaran	Variabel kinerja bendahara dominan memengaruhi serapan anggaran daerah (ejurnal.stie-portnumbay.ac.id)

Sumber: Dari berbagai sumber (2025)

Urgensi Penelitian

Berdasarkan fenomena di atas, penting dilakukan penelitian mendalam mengenai peran bendahara pengeluaran di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Wilayah ini memiliki tantangan geografis dan keterbatasan SDM yang dapat memengaruhi jalannya pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan nyata serta merumuskan strategi peningkatan akuntabilitas, demi mendukung transparansi, efektivitas pengelolaan dana publik, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di kawasan timur Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan tugas di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah?
2. Hambatan apa saja yang ditemui bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah?
3. Strategi apa yang telah atau dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi?

TINJAUAN LITERATUR

Peran Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Peran bendahara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena berkaitan langsung dengan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Menurut Soekanto (2021), peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, yang mencakup perilaku dan kewajiban sesuai fungsi sosial yang diemban.

Penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya peran bendahara dalam menjamin efisiensi dan akuntabilitas belanja pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Lebih lanjut, studi oleh Sutrisna (2020) menunjukkan bahwa peran bendahara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bendahara memiliki implikasi langsung terhadap kredibilitas keuangan daerah.

Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran

Tanggung jawab bendahara pengeluaran mencakup aspek administratif, moral, dan hukum (Hasibuan, 2021). Secara administratif, bendahara harus mematuhi prosedur yang berlaku. Secara

moral, ia dituntut bekerja jujur dan profesional, sementara secara hukum, bendahara dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terjadi kerugian negara.

Dalam konteks pemerintahan daerah, bendahara pengeluaran tidak hanya bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen dan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan nasional (Supriyono, 2021). Penelitian Agustinus (2024) di Papua menegaskan bahwa kinerja bendahara berpengaruh dominan terhadap serapan anggaran daerah, sehingga tanggung jawab bendahara tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan (Halim, 2021). Prinsip utama pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Studi Pangaribuan dan Situmorang (2024) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, memperkuat argumen bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan. Namun, tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarbagian yang belum optimal, serta keterlambatan pelaporan (Darmansyah et al., 2025).

Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Keuangan

Beberapa penelitian mengidentifikasi faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain: kurangnya koordinasi antarbagian, keterbatasan kompetensi bendahara, serta dinamika perubahan kebijakan anggaran (Supriyono, 2021; Darmansyah et al., 2025). Hasil penelitian di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi, perubahan mendadak dalam anggaran, serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Desain ini dipilih karena fokus penelitian adalah menggali secara mendalam peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik, dengan mengutamakan makna daripada generalisasi statistik (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan studi kasus relevan karena penelitian diarahkan pada satu unit analisis tertentu dalam konteks nyata, yaitu praktik pengelolaan keuangan di institusi pemerintah daerah (Yin, 2018).

Populasi penelitian adalah seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah, khususnya yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan. Dari populasi tersebut, penelitian melibatkan 10 informan kunci yang terdiri atas pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, kepala subbagian keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu, serta staf pengelola keuangan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yakni memilih subjek berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

Lokasi penelitian adalah Sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah, sebagai salah satu unit kerja strategis pemerintah daerah yang menangani perencanaan, pencairan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Papua Tengah merupakan provinsi baru hasil pemekaran, sehingga masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem administrasi keuangan yang efektif. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, seiring dengan pelaksanaan tahun anggaran berjalan, sehingga memberikan gambaran aktual mengenai dinamika pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan mengenai peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran.

Observasi dilakukan untuk memahami praktik sehari-hari dalam pengelolaan keuangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan, surat pertanggungjawaban (SPJ), dokumen pencairan dana, dan regulasi terkait. Triangulasi data dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi relevan terkait peran, tanggung jawab, dan hambatan dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola temuan lapangan, yang kemudian diverifikasi dengan bukti empiris (Miles et al., 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan realitas empiris secara komprehensif sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 10 informan kunci yang terdiri dari pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat pembuat komitmen, kepala subbagian keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu, serta staf pengelola keuangan. Karakteristik responden disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Nama/ Inisial	Jabatan/Posisi	Lama Bekerja	Pendidikan Terakhir
1	I.K.	Pengguna Anggaran	8 tahun	S1
2	R.K.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	10 tahun	S2
3	D.P.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	6 tahun	S1
4	Y.M.	Pejabat Pembuat Komitmen	12 tahun	S1
5	H.A.	Kepala Subbagian Keuangan	11 tahun	S1
6	M.D.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	7 tahun	S1
7	A.W.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	5 tahun	S1
8	M.S.	Staf Pengelola Keuangan	4 tahun	S1
9	C.T.	Staf Pengelola Keuangan	3 tahun	S1
10	W.N.	Staf Pengelola Keuangan	2 tahun	S1

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun dan pendidikan minimal sarjana. Hal ini menunjukkan bahwa para informan memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan informasi yang relevan mengenai praktik pengelolaan keuangan di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah.

Hasil Wawancara

Dari wawancara mendalam diperoleh beberapa temuan penting.

1. **Proses pengelolaan keuangan**
   Seorang pengguna anggaran (I.K.) menyatakan:
   "Bendahara bertugas memastikan anggaran digunakan sesuai rencana yang disetujui dan mengikuti prosedur. Hambatannya biasanya koordinasi antarbagian belum optimal, sehingga pencairan sering terlambat."

2. **Peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran**
   Pejabat pelaksana teknis (R.K.) menegaskan:

   "Tanggung jawab bendahara tidak hanya sebatas pencairan dana, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan ketepatan laporan. Hambatan sering muncul dari ketidaksesuaian rencana dan realisasi anggaran."

3. **Hambatan dalam pengelolaan keuangan**
   Pejabat pembuat komitmen (Y.M.) menambahkan:

   "Masalah terbesar adalah lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Hal ini bisa memengaruhi akurasi laporan."

Wawancara ini memperlihatkan bahwa bendahara berperan strategis dalam menjaga akuntabilitas, namun masih menghadapi hambatan koordinasi, pengawasan, dan konsistensi anggaran.

Analisis Tematik

Berdasarkan hasil wawancara, analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama sesuai fokus penelitian.

Tabel 3. Hasil Analisis Tematik

Tema Utama	Kode Data Lapangan	Ringkasan Temuan
Proses Pengelolaan Keuangan	"Memastikan kesesuaian dengan rencana, verifikasi dokumen, pencairan dana, dan pelaporan"	Pengelolaan dilakukan sistematis namun masih terhambat oleh koordinasi
Peran & Tanggung Jawab Bendahara	"Tidak hanya mencairkan dana, tetapi menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tepat waktu"	Bendahara memiliki peran teknis sekaligus strategis
Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan	"Koordinasi lemah, realisasi anggaran berbeda dari rencana, pengawasan minim"	Hambatan struktural dan administratif memengaruhi efektivitas

Sumber: Hasil penelitian (2025)

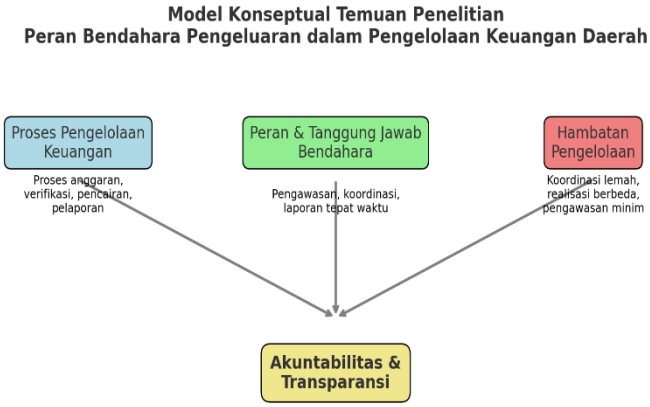
Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bendahara pengeluaran tidak sebatas administratif, melainkan juga strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutrisna (2020), yang menemukan bahwa peran bendahara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BLUD, serta Agustinus (2024) yang menegaskan pengaruh dominan kinerja bendahara terhadap serapan anggaran di Papua.

Tanggung jawab bendahara yang mencakup aspek administratif, moral, dan hukum (Hasibuan, 2021) tercermin dalam praktik di Sekretariat BPPKAD. Namun, hambatan berupa koordinasi antarbagian, perubahan mendadak dalam anggaran, dan lemahnya pengawasan menunjukkan perlunya perbaikan sistem. Hal ini mendukung pandangan Pangaribuan dan Situmorang (2024) bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah faktor kunci dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab rumusan masalah:

1. **Proses pengelolaan keuangan** di BPPKAD dilakukan melalui tahapan perencanaan, verifikasi, pencairan, dan pelaporan.
2. **Peran dan tanggung jawab bendahara** mencakup memastikan kesesuaian anggaran, menjaga akuntabilitas, dan meningkatkan koordinasi.
3. **Hambatan** yang dihadapi meliputi koordinasi yang belum optimal, ketidaksesuaian realisasi dengan rencana, serta lemahnya pengawasan.



Sumber: Persepsi penulis (2025)

Model konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa **akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah** merupakan hasil interaksi tiga komponen utama, yaitu: *proses pengelolaan keuangan*, *peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran*, serta *hambatan pengelolaan*.

Pertama, **proses pengelolaan keuangan** mencakup tahapan perencanaan anggaran, verifikasi dokumen, pencairan dana, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Proses ini merupakan fondasi utama dalam memastikan dana publik digunakan sesuai peraturan.

Kedua, **peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran** berfungsi sebagai pengendali dan penjaga akuntabilitas. Bendahara tidak hanya bertugas mencairkan dana, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan anggaran, menjaga transparansi administrasi, melakukan pengawasan, serta menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, bendahara berperan sebagai aktor strategis yang menghubungkan sistem keuangan daerah dengan praktik operasional di lapangan.

Ketiga, terdapat **hambatan dalam pengelolaan keuangan**, antara lain lemahnya koordinasi antarbagian, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, serta kurangnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana. Hambatan-hambatan ini berpotensi mengurangi efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah dan menurunkan kualitas laporan keuangan.

Dari interaksi ketiga komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik proses pengelolaan keuangan dan semakin optimal peran bendahara, maka akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah akan meningkat. Namun, keberhasilan tersebut hanya dapat tercapai apabila hambatan yang ada dapat diminimalisasi melalui perbaikan koordinasi, peningkatan kapasitas bendahara, dan penguatan sistem pengawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa **bendahara pengeluaran di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah** memegang peran strategis dalam menjaga kelancaran pengelolaan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan anggaran, verifikasi dokumen, pencairan dana, pengawasan, serta penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, bendahara pengeluaran bertanggung jawab memastikan kesesuaian penggunaan anggaran, menjaga akuntabilitas, menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu, serta meningkatkan koordinasi antarbagian.

Namun demikian, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah hambatan, antara lain lemahnya koordinasi antarbagian, perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, perubahan mendadak dalam kebijakan anggaran, serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada keterlambatan pencairan dana, penurunan efektivitas pengelolaan, serta potensi menurunnya kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab bendahara pengeluaran sangat menentukan tingkat **akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah**, sehingga penguatan kapasitas bendahara, sistem koordinasi, dan mekanisme pengawasan menjadi kebutuhan mendesak bagi perbaikan tata kelola keuangan di Papua Tengah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. **Peningkatan kapasitas bendahara** melalui pelatihan teknis keuangan daerah, penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital, serta pemahaman regulasi terbaru agar bendahara mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara profesional.
2. **Penguatan koordinasi antarbagian** di lingkungan Sekretariat BPPKAD dengan membangun mekanisme komunikasi yang lebih efektif, misalnya melalui rapat koordinasi rutin dan penggunaan sistem informasi terintegrasi.
3. **Perbaikan sistem pengawasan internal**, baik melalui peningkatan peran atasan langsung maupun pemanfaatan audit internal secara berkala, sehingga dapat meminimalisasi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran sesuai regulasi.
4. **Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi** dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mempercepat proses verifikasi, pencairan, dan pelaporan.
5. **Penelitian lanjutan** dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur secara empiris pengaruh peran bendahara terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga memperkuat generalisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus. (2024). Pengaruh kinerja bendahara pengeluaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap serapan anggaran. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, 12*(1), 45–56. https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/301

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.

Darmansyah, T., et al. (2025). Peran dan tanggung jawab bendahara umum dalam pengelolaan keuangan administrasi di Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik, 8*(2), 112–125.

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5*(1), 1–

4. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11

Halim, A. (2021). *Manajemen keuangan daerah*. Salemba Empat.

Hasibuan, M. (2021). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara.

Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 108–115. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *2*(1), 45–51. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.

Pangaribuan, R., & Situmorang, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Batam. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 12*(1), 121–133. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/3519

Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota : Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 22–28. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300

Soekanto, S. (2021). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.

Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPTSP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(2), 61–69. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/

Supriyono, B. (2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi, 18*(2), 101–113.

Sutrisna, H. (2020). Pengaruh peran bendahara dan penggunaan aplikasi keuangan terhadap kualitas laporan BLUD. *Manners, 3*(1), 35–47. https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/manners/article/view/357

Tampang, G. I., Lambe, K. H. P., & Baharuddin, B. (2025). Pengaruh Pelatihan dan Pemanfaatan SIRUP terhadap Transparansi Pengadaan di Kabupaten Yahukimo Pendahuluan. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(2), 1–11. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/977

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.